www.elsam.or.id

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI



KARPET MERAH BUAT PEMODAL

ASASI EDISI JULI - AGUSTUS 2015

daftar isi

4 EDITORIAL
Gagap Menjelang 2015

Dalih menjembatani ketimpangan pertumbuh an ekonomi negara-negara di ASEAN sebagai spirit MEA dikhawatirkan hanya menjadi pepe-san kosong, manakala pemodal asing bisa de ngan leluasa melakukan penetrasi dengan mu-dah dan berbiaya minim. Sementara di sisi lain, peningkatan daya saing dan penjaminan akses masyarakat lokal di Indonesia pun masih ter bata-bata. Dengan kondisi demikian, maka poten si kehancuran sektor produksi nasional baik industri dan pertanian pun kian tak terelakkan.

5 LAPORAN UTAMA
8 **Kebijakan Miskin Strategi**

Peluit Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera dibunyikan akhir tahun ini. Meski begitu, banyak lubang yang belum rampung di-tambal Indonesia, untuk memasuki pusaran per saingan. Strategi kebijakan pun dipertanyakan.

9 LAPORAN UTAMA
13 **Yang Terhempas, Yang Bertahan**

Sebagaimana jamaknya pembangunan, pasti akan meninggalkan ekses-ekses yang tak ter-hindarkan. Dalam konteks MEA di mana pem-bangunan digenjot habis-habisan, pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM) pun menjadi sebuah keniscayaan.

Gerakan Politik Akar Rumput, Sebuah Solusi

Salah satu kunci untuk menghadapi MEA ada-lah penguatan gerakan sosial yang muncul dari akar rumput. Peran pemerintah dalam hal ini pun jelas, yakni memfasilitasi serikat buruh agar aktif dalam forum tripartit dan menyuarakan hak-haknya. Lebih jauh, akan sangat baik jika pesan-pesan perjuangan itu bisa tersampaikan lewat corong yang tepat, gerakan politik berbasis partai misalnya.

14 DATA GRAFIS
15 **Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi**

16 OPINI
18 **MEA dan Pekerja Perempuan**

Bagaimana posisi perempuan dalam rantai MEA? Perempuan pekerja Indonesia berada dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan di dalam percaturan glo bal liberalisasi tenaga kerja. Nasib perempuan pekerja migran di luar negeri adalah potret bu-ram lepas tangannya negara dalam melindungi dan meningkatkan kemampuan pekerja perem-puan Indonesia. Belum lagi masalah rendahnya upah dan tingginya jam kerja.

19 **Penggusuran dan Mesin Pertumbuhan Kota**
22

Beberapa hari lalu, perhatian publik kita banyak tertuju pada proses penggusuran warga Kam-pung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Banyaknya opini yang berseliweran mengenai penggusuran itu, membuat kita tahu bahwa persoalan kota adalah politik sehari-hari bagi warganya. Politik yang sangat bersentuhan dengan kehidupan warga secara langsung, karena bagaimanapun kota adalah sebuah ruang bersama.

23 RESENSI FILM
26 ***Laissez-faire*** **Regional, dari** ***Maquiladora*** **ke MEA**

Border Industrialization Program, atau lebih dikenal sebagai *Maquiladora*, yang diterapkan pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat pada 1960-an, merupakan salah satu babak sejarah *laissez-faire* industri paling awal di dunia ketiga. Maquiladora inilah yang kemudian memulus-kan jalan menuju *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) pada 1996. Film dokumen ter besutan Vicky Funari dan Sergio De La Torre, *Maquilapolis: City of Factories*, menunjukkan dampak-dampak laissez-faire regional di ta-taran lokal.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA
ASASI
www.elsam.or.id

Redaksional

Penanggung Jawab
Wahyu Wagiman

Pemimpin Redaksi:
Purnama Ayu Rizky

Dewan Redaksi:
Andi Muttaqien, Wahyudi Djafar, Ari Yurino

Redaktur:
Adzkar Ahsinin, Adiani Viviana, Miftah Fadhli, Ruben Sumigar

Reporter:
Kosim, Paijo

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Tata Letak dan Infografis:
Dodi Sanjaya

Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM)

Alamat Redaksi
Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Telepon (021) 7972662,79192564 Faximile : (021) 79192519. E-mail :office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Pembaca yang terhormat,

Dalam hitungan bulan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera direalisasikan. Meski begitu,banyak pekerjaan yang belum paripurna ditunaikan. Belum lagi ancaman pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dalam praktiknya, bahkan sudah banyak me nimpa kaum akar rumput, baik petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Sementara itu komitmen negara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi lewat mekanisme MEA pun menjadi anomali. Pasalnya, MEA ternyata hanya digunakan sebagai ladang emas bagi para pemodal besar, alih-alih menyejahterakan rakyatnya.

ASASI kali ini mendedah tema Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesiapan, serta potensi pelanggaran HAM sebagai ekses yang tak terelakkan. Selain menge tengahkan laporan jurnalistik, buletin ini juga di lengkapi dengan artikel opini dari dua penulis: Zely Ariane yang menulis soal MEA dalam perspektif gender dan Dicky Dwi A. yang menulis tentang proses *land grabbing* di perkotaan. Simak pula tulisan resensi film "Maquilapolis" yang renyah dari Azhar Irfansyah, pegiat suara buruh Sedane.

Akhir kata, selamat membaca.

Redaksi

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin Asasi bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap keredaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapa pun nilainya. Transfer kerekening :
ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9

Gagap Menjelang 2015

Sejak cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dan Pia gam ASEAN diketok palu, maka ASEAN resmi memasuki rezim baru per dagangan bebas. Konsekuen sinya, pelbagai sektor ekonomi akan diintegrasikan, sehingga pasar tunggal dan basis produksi menjadi suatu keniscayaan. Dalih men jembatani ketimpangan per tumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN pun pada akhirnya hanya menjadi pepesan kosong, manaka-la pemodal asing bisa dengan le-luasa melakukan penetrasi dengan mudah dan berbiaya minim. Se-mentara di sisi lain, peningkatan daya saing dan penjaminan akses masyarakat lokal di Indonesia ma-sih terbata-bata. Dengan kondisi demikian, maka potensi kehancu-ran sektor produksi nasional baik industri dan pertanian pun kian tak terelakkan.



Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (sumber harukaedu.com).

Kehancuran itu menjadi sangat mungkin, pertama, mengingat Indonesia dibanding negara ang-gota ASEAN lainnya, memiliki jum-lah penduduk terbesar—itu ber arti menjadi pasar terbesar pula. Dari jumlah penduduk di kawasan ASEAN pada tahun 2012 yang mencapai sekitar 616 juta, jumlah penduduk Indonesia mencapai 245 juta. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, Indonesia tentu akan menjadi target empuk dari para pemodal asing.

Kedua, langkah Pemerintah Indo-nesia dengan memproduksi ber bagai kebijakan yang pro modal jelas akan semakin menjauhkan rakyat terhadap sumber peng-hidupannya. UU Perdagangan, UU Pangan, UU Pertanahan sebagai substitusi UUPA, Peraturan Men teri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang penghapusan kewa-jiban berbahasa Indonesia bagi pekerja ekspatriat, dan menge-sahkan Pepres 39/2014 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka.

Di sektor tenaga kerja/ buruh, dengan adanya MEA, memung kinkan tenaga kerja asing leluasa keluar masuk Indonesia. Alhasil, akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh In-donesia yang menurut ADB dan ILO, kualifikasinya masih di bawah standar (sebanyak 63 persen). Pun, lulusan perguruan tinggi juga akan kian tergencet dengan adanya persaingan dengan tenaga kerja asing yang lebih berkualitas. Apalagi untuk mampu bersaing, akan diberlakukan aturan sertifi-kasi dan standarisasi mutu tenaga pendidikan.

Ketiga, sekaligus yang paling men-dasar, jika ditinjau dari ruh MEA yang berporos pada agenda liberal-isasi, jelas ini bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan. Be-lajar dari sejarah, neoliberalisme akan membuat kalangan pengusa-ha, buruh, petani, dan kaum akar rumput jadi makin termarjinalkan. Pertanyaannya, lagi-lagi menga-pa Pemerintah Indonesia ikut me ratifikasi piagam ASEAN dan cetak biru MEA yang jelas-jelas berlan-daskan neoliberalisme? Apa sebe tulnya alasan yang paling men-dasar dalam keikutsertaan Indone-sia dalam MEA 2015 ini? Apakah Indonesia sudah betul-betul siap memasuki era baru ini pada akhir 2015, atau sebaiknya memang In-donesia tak perlu menjadi bagian di dalamnya?



Warga Jorong Rantau Panjang, Sumatera Barat diapit perusahaan Wilmar Group, namun tetap hidup dalam garis kemiskinan (sumber www.mongabay.co.id).

Kebijakan Miskin Strategi

Peluit Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera dibu nyikan akhir tahun ini. Meski begitu, banyak lubang yang belum rampung ditambal Indonesia, untuk memasuki pusaran per saingan. Strategi kebijakan pun dipertanyakan.

Usai krisis 1998 yang membuat Indonesia terganjal hutang, strategi dasar pembangunan ekonomi kita hilang. Indonesia memasuki sebuah era di mana landasan ekonomi semua bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Di tingkat global, skenario ekonomi berada di bawah bayang-bayang World Trade Organization (WTO) dan Free Trade Agreement (FTA). Sementara di tingkat regional ASEAN, kedaulatan ekonomi kita dilucuti oleh mekanisme MEA.

MEA sendiri sebetulnya ha nyalah perpanjangan tangan dari agen neolib global yang berada di ASEAN. Tonggak MEA pertama kali dipancang lewat persetujuan Common Effective Prefential Ta riff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada 1992. Setelah itu, pelbagai perjanjian untuk memuluskan terbentuknya pasar bebas yang *kaffah* pun digagas. Edy Burmansyah, pegiat Agrarian Resource Centre (ARC) menjelaskan, pada 2003 Indonesia ikut menyetujui Bali Concord II (Declaration of ASEAN Concord II), yang melegi timasi pembentukan ASEAN Community. Empat tahun berselang, tepatnya 20 November 2007, anggota ASEAN menandatangani cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN bersama piagam ASEAN.

Sejak itulah ASEAN resmi me masuki era masyarakat ekonomi terintegrasi—mengimitasi Uni Eropa- dengan capaian tertinggi be rupa pasar tunggal dan basis produksi. Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari MEA, yaitu: 1) pergerakan bebas arus barang; 2) pergerakan bebas jasa; 3) pergerakan bebas investasi; 4) pergerakan bebas modal dan 5) pergerakan bebas tenaga kerja terampil (*Blue Print MEA*).

Salah satu hal yang membeda-

kannya dengan Uni Eropa terletak pada langgam integrasi ekonomi, di mana Indonesia berwujud *common market*, sedang Uni Eropa menerapkan sistem *customs union*. "Konsekuensi dari pemberlakuan *common market* adalah wilayah ASEAN harus betul-betul dibebaskan dari berbagai hambatan, baik barang maupun jasa. Perlakuan negara pun sama, tidak ada perbedaan," ujar pria yang juga aktif di Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) tersebut. Berbeda dengan Uni Eropa, di sana masing-masing negara memiliki instrumen untuk memproteksi negerinya sendiri. Misal Jerman punya kebijakan non *tariff bar riers* untuk melindungi komoditinya. "Contoh sederhana, kalau Belanda mau ekspor pisang ke Jerman, maka pisang itu harus memenuhi kualitas tertentu, harus matang, dan sebagainya. Contoh lain, barang impor berupa colokan listrik pun harus memenuhi spesifikasi tertentu yakni colokan berkaki tiga. Hal semacam itu tak dimiliki negara-negara di ASEAN," imbuh nya.

Celaka dua belas, selain menganut sistem *common market*, desain industrialisasi global selalu me nempatkan Indonesia pada posisi marjinal. Maksudnya, Indonesia hanya difungsikan sebagai pasar, karena labelisasi 'negara dunia ketiga' yang melekat padanya. Hal itu tercatat sejak pasca Perang Dingin, Indonesia diproletarisasi lantaran hanya dipandang menjadi pasar, domainnya semua komoditi asing bercokol. Sementara label negara dunia pertama tetap dipegang Amerika, sedang negara dunia kedua direbut Hongkong, Jepang, Korea, dan Singapura.

Menurut Anwar Sastro Maruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), desain serupa juga terjadi dalam pengklasifikasian negara-negara di ASEAN. "Ada dua kelompok besar yakni ASEAN bagian Mekong dengan ne gara industri Vietnam, negara finan sial Thailand, dan negara pasar meliputi Laos, Kamboja, dan seki tarnya. Kelompok kedua ASEAN bagian selatan di mana cap negara industri utama dihuni Malaysia, negara finansial Singapura, dan sisanya menjadi pasar, termasuk Indonesia," urainya.

Padahal dengan kualitas dan kuantitas sumber daya yang melimpah ruah, Indonesia punya pilihan untuk selangkah lebih maju diban ding negara tetangga. Indonesia sendiri merupakan negara ke pulauan terbesar dengan jumlah penduduk sebanyak 245 juta—dari total penduduk ASEAN sejumlah 616 juta. Belum lagi usia produktif (angkatan kerja) di Indonesia yang mencapai 51,3% (*ASEAN Statistical Yearbook 2013*).

Sayangnya, kendati punya 'modal', menurut Sri Palupi, Indonesia dari dulu hingga sekarang punya latah mengimani 'ekonomi perbu dakan'. Maksudnya, Indonesia selalu mem-plot dirinya untuk se nantiasa melayani kepentingan para pemodal. "Kalau prinsipnya untuk menghamba pada pemodal, mau dibolak-balik arahnya akan selalu ke sana. Kalau pun ada alokasi untuk kaum akar rumput, itu hanya aksesoris saja supaya terlihat wajah populis dalam kebijakan itu. Namun secara substansial, orang kecil tidak akan dapat tempat dalam rantai MEA," jelas peneliti Ecosoc Rights Institute ini.

Alih-alih memanfaatkan sumber daya yang ada, lanjutnya, ma syarakat kita justru "dipaksa" untuk menjadi budak, di Indonesia atau di luar negeri. "Budak itu bukan sebuah pilihan tapi keterpaksaan yang harus diambil. Dengan situasi kualitas sumber daya manusia yang mana sejumlah 76,4 juta jiwa, atau sekitar 64 persen pekerja di Indonesia adalah jebolan SMP ke bawah, saya kira mereka tidak punya pilihan. Ya itu tadi, hanya bisa pasrah melayani majikan saja," ujarnya.

Karpet merah buat pemodal

Sementara itu, kebijakan yang diambil pemerintah sama sekali tak membebaskan warga Indonesia dari keterkungkungan ini. Sa lamudding Daeng, dalam laman resmi Institute of Global Justice (IGJ) menuturkan, tercatat regulasi yang ada justru diatur sedemikian rupa, demi memuluskan upaya imperialisme lewat perdagangan bebas. Misal, Amandemen ke-4 UUD 45 tahun 2002, pemerintah justru memasukkan kata 'efisiensi' dalam pasal 33 dan menghapus penjelasan UUD 45. Seluruh UU sektoral sejak itu juga diubah menjadi UU yang pro kebijakan neoliberal dan ramah pasar. Sebut saja UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama pasal 3 dan pasal 36 yang menyulitkan pemenuhan hak atas pangan, dan berimbas pada tidak jelasnya tanggung jawab negara. Lantas negara juga berwenang membuka keran impor atas dasar pemenuhan pangan yang jelas-jelas merugikan petani kecil.

Selain itu, regulasi yang perlu jadi sorotan adalah RUU Perdagangan yang baru-baru ini disahkan peme rintah. Riza Damanik dalam laman resmi IGJ menilai, pengesahan RUU Perdagangan tidak akan efektif melindungi kepentingan nasional dari ancaman liberalisasi perdagangan. Hal ini karena, ketentuan yang ada di dalam RUU tersebut tetap

mengacu kepada perjanjian per dagangan internasional WTO. Mi salnya bisa dijumpai pada pasal 20 dan 21 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan ketentuan tentang *anti-dumping, safeguard*, dan tindakan balasan subsidi yang juga diatur di dalam GATT. Termasuk pula penerapan aturan Standarisasi nasional yang tidak boleh melanggar ketentuan Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Selain itu, ketentuan WTO tentang liberalisasi jasa dan investasi pun tak berhasil dibendung dengan RUU Perdaga ngan karena pendominasian terhadap kepemilikan asing hingga 95% di sektor ekonomi strategis negara tidak dibatasi yang diatur dalam undang-undang penanaman mo dal (IGJ).

UU lainnya yang belakangan ini menjadi sorotan adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pedoman Dasar Pokok Agraria (UUPA). Niat pemerintah kita untuk mengganti UUPA menjadi UU Pertanahan dipandang akan rentan merugikan para petani. Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan MEA itu sendiri. Pasalnya UUPA sudah cukup komprehensif memuat ketentuan perlindungan hak atas tanah.

Rizky Mardhatillah Umar, peneliti ASEAN Centre Studies UGM menginventarisir empat pasal penting dalam UUPA. Pasal-pa sal tersebut punya fungsi fundamental dalam menjaga keber langsungan hidup rakyat dan akses mereka atas sumber daya alam, termasuk tanah. *Pertama* pasal 9 tentang kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. *Kedua*, pa sal 10, bahwasanya setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. *Ketiga*, pasal 13 pemerintah ber usaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran. *Keempat*, pasal 15, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertenta ngan dengan kepentingan nasio nal diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepen tingan golongan yang ekonomis lemah (*www.indoprogress.com*). Signifikansi inilah yang akhirnya membuat mayoritas petani menentang rencana pemerintah untuk mensubstitusi UUPA menjadi UU Pertanahan.

Tak hanya ketentuan UU saja yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pemodal. Aturan-aturan lain yang bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap rakyat, juga bisa dilihat pada Peraturan Presiden (Perpres) yang disahkan pada akhir ke kuasaan SBY. Tepatnya pada 2014, Presiden SBY menelurkan Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka. Di dalamnya antara lain disebutkan, bahwa sektor pertanian dan perkebunan akan dibuka lebar untuk investor asing.

Edy Burmansyah menandaskan, segala peraturan yang diproduksi pemerintah tersebut menjadi indikasi bahwa MEA memang akan diarahkan menuju poros industri. “Pada intinya, Indonesia menjadi pihak yang paling gigih meng-*goal*kan MEA dan mendukungnya lewat berbagai instrumen kebijakan. Belum lama ini bahkan peraturan tentang wajib berbahasa Indonesia bagi para ekspatriat yang bekerja di Indonesia ikut dihapus, lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015,” ujarnya.

Ihwal penghapusan aturan tentang wajib berbahasa Indonesia itu dipandang aneh oleh Edy. “Ini akan membuat persaingan di pasar tenaga kerja semakin ketat. Padahal dalam berbagai aspek, tenaga kita memang sudah kalah bersaing sejak awal. Apalagi sebetulnya salah satu tujuan masuknya investasi asing adalah membuka lapangan kerja, tapi syarat instrumen untuk memberi proteksi pada kita justru dihapus,. Kalau sudah begini, maka kemungkinan paling besar, gelombang ekspor tenaga kerja kita (TKI/TKW) ke negara-negara tujuan populer akan semakin deras,” tuturnya.

Celakanya lagi, perjanjian tenaga kerja dalam kerangka MEA hanya mengatur tentang *skill labour*, dan tidak mengatur *unskill labour*. “ Padahal mayoritas tenaga kerja kita itu adalah *unskill labour*, seperti menjadi pembantu, kuli bangunan, pekerja sawit di Malaysia. Karena tidak ada perlindungan maka potensi kekerasan di luar negeri akan semakin besar. Di dalam ne geri juga kehilangan perlindungan, padahal idealnya fungsi negara memang harus selalu hadir untuk memberi perlindungan,” tambah nya.

Hal itu kian diperparah dengan tidak dibarenginya perlindungan atas hak asasi manusia. “Bayangan akan pelanggaran HAM jelas-jelas sudah tampak di pelupuk mata. Tanpa MEA saja pemerintah Indonesia sudah merampas hak ma syarakat, apalagi dengan adanya pasar bebas. Jelas relasi patro-

nase antara korporasi dan kaum akar rumput akan makin timpang. Sementara negara hanya diam saja," ucapnya.

Berpacu mengejar waktu

Pertanyaan mendasar selanjutnya, lantas bagaimana kesiapan Indonesia di berbagai sektor, dalam menyongsong MEA. Catatan Kementerian Perekonomian pada 2014 menunjukkan, Singapura menempati tempat teratas soal capaian implementasi MEA 2008-2013 dari antara 10 negara ASEAN. Angkanya mencapai 81,3 persen. Di bawah Singapura, bercokol Thailand dengan angka 81,1 persen. Sementara, Laos menempati posisi bontot dengan angka 76,9 persen. Peringkat kedua dari bawah, barulah Indonesia dengan pencapaian 77 persen. Rerata pencapaian kawasan ASEAN sendiri adalah 72,2 persen (*kompas.com*).



Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera (sumber *facebook* Ari Yurino).

Berangkat dari rendahnya capaian Indonesia inilah, beberapa pengamat memberikan rekomendasi dan penilaian. Rizky menegaskan, dari sisi regulasi persiapan Indonesia jelas cukup parah. Namun dari sisi kelembagaan, sudah ada beberapa inovasi. Hanya saja, problemnya masih sama, yakni tidak ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lain.

Sementara di sektor strategis lainnya, belum semua tergarap dengan baik. "Pendekatan pemerintah masih parsial dan sektoral. Tidak ada persiapan khusus menghadapi MEA, kecuali dengan menginisiasi Sekretariat Nasional ASEAN di Kemenko Perekonomian. Secara nyata, belum ada terobosan untuk sektor-sektor strategis tersebut," ungkapnya.

Pemerintah menurut Sastro, harus berperan aktif memfasilitasi sektor riil untuk bisa bersaing. Misal memberi modal, menyusun aturan perlindungan atas mereka, melakukan pendampingan, pelatihan, dll.

Pemerintah lokal pun menurut Rizky juga bisa ambil bagian di dalamnya. "Pemda mestinya bisa menggunakan semua infrastruktur yang dimiliki untuk menyiapkan diri menghadapi MEA. Sebab, tumpuannya sekarang di Pemerintah Daerah. Minimal harus diran cangan dokumen perencanaan (RPJM/RKP) yang berorientasi MEA, dan mengalokasikan anggaran. Selain itu, pemberdayaan kepada sektor-sektor kecil juga harus dilakukan, seperti kepada petani.," tuturnya.

Namun yang terjadi sekarang menurut Sri Palupi, peran Pemda dalam penjaminan HAM dan perlindungan akses hidup kaum akar rumput nyaris nihil. "Saya tak melihat Pemda banyak melakukan insiatif-inisiatif. Dalam praktiknya pun, Pemda keberpihakannya juga ke pemodal besar. Misal dalam sektor sawit, karena sekarang ada moratorium, gerak investor agak terhambat. Maka mereka menggunakan modus berupa plasma. Mereka mengambil alih aset desa de ngan strategi yang baru. Jadi seperti rakyat mensubsidi aset mereka ke perusahaan," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Adriana Elisabeth, peneliti LIPI, "Peran Pemda dalam kerangka otonomi daerah sangat besar, karena dia punya wewenang untuk mengelola aset-aset daerah. Namun sayang, wewenang itu kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan masyarakat di daerah," keluhnya.

Lepas dari ketidaksiapan Indonesia di berbagai sektor, jika Indonesia tetap bersikeras mengambil bagian dalam hiruk pikuk MEA, maka ada banyak hal yang harus segera diselesaikan. "Terutama pemerintah mesti sadar, bahwa hak sipol dan ekosob perlu dilindungi semaksimal mungkin. Jangan sampai komitmen 'negara akan selalu ha dir' yang tertuang dalam Nawa cita Jokowi, hanya jadi lipstik saja," pungkas Sastro.



*Nelayan, salah satu profesi yang rentan mendapat pelanggaran HAM akibat berlangsungnya MEA (*sumber beritadaerah.co.id).

Yang Terhempas, Yang Bertahan

Bagaimana membayangkan roda kehidupan masyarakat Indonesia berjalan? Jika petani tak punya tanah, angkatan kerja menganggur, dan nelayan tak bisa lagi mencari ikan.

Meski masih dihadang setumpuk persoalan, MEA tetap jalan terus. Belum tuntas pula masalah-masalah l*and grabbing* di tingkat akar rumput, krisis ekonomi berkepanjangan, industri modal dan asuransi yang lesu, hingga kurs nilai rupiah atas dolar yang menukik tajam. Namun Indonesia, lagi-lagi tetap bersikukuh memberlakukan MEA pada penghujung tahun ini. Dalih yang selalu didengung-dengungkan sama, yakni untuk mengangkat Indonesia dari krisis. Lepas dari apakah keikutsertaan dalam MEA itu akan mengebiri hak masyarakat atau tidak, itu soal nanti. Setidaknya keresahan itulah yang selalu dirasakan Anwar Sastro Maruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).

Bukan tanpa alasan mengapa pegiat isu-isu buruh tersebut merasa demikian. Ia mengaku pernah mengalami sendiri betapa hak-haknya sebagai buruh pernah dirampas oleh korporasi. “Jauh sebelum MEA riuh dibicarakan, pada 1995 saya merasakan betul betapa kuatnya represi pabrik atas saya dan teman-teman buruh lain. Hal itu tampak dari besaran upah yang tak setimpal dengan jam kerja yang kami berikan, PHK sepihak, hingga pelarangan berserikat,” ungkapnya. Kekecewaannya terhadap mekanisme kerja korporasi inilah yang membuatnya giat menggulirkan wacana untuk “memerdekakan” buruh lewat berbagai jalur, baik secara diplomatik maupun turun langsung ke jalan menyuarakan aspirasinya.

Perjuangan tersebut menemukan

momentum manakala MEA akan segera direalisasikan. Bersama-sama dengan serikat buruh, petani, nelayan, pekerja LSM, dan akademisi se-Asia Tenggara, ia merapatkan barisan. Tujuannya satu, yakni ingin merebut kembali kedaulatan dan hak asasi manusia (HAM) yang acap kali dilanggar.

Apalagi menurut hemat Sastro, MEA jelas melahirkan pelanggaran HAM yang luar biasa hingga ke tatanan masyarakat terkecil. Potensi pelanggaran, terutama hak ekosob muncul lantaran minimnya persiapan yang dilakukan peme rintah Indonesia. “Pemerintah kita tidak menyiapkan rakyatnya untuk menghadapi MEA, yang dilayani hanyalah kepentingan pemodal,” tegasnya.

Dalam konteks Indonesia saat ini, MEA digadang-gadang pemerintah menjadi salah satu kanal penyelamat, atas kondisi ekonomi kita yang tengah mengalami kelesuhan. “Krisis sekarang ini adalah krisis akumulasi modal se hingga uang tidak beredar. Akhir nya butuh cara-cara lewat berhutang, negara berhutang, rakyat pun berhutang. Tidak heran jika Jokowi selalu bicara tentang ekspansi dan pembangunan infrastruktur melalui MEA dan perpanjangannya: MP3EI (sekarang RPJMN. *Red*). Pembangunan infrastruktur itu meliputi pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara internasional, industri tambang, perkebunan, per tanian dan per ikanan, serta energi dan kelistrik an. Itu semua ditempuh supaya uang bisa masuk,” ungkapnya.

Senada dengan Sastro, Rizky Mar dhatillah, peneliti Asean Centre Studies UGM mengungkapkan, MEA memerlukan peran negara dalam mendistribusikan ekonomi di kawasan. “Persoalannya, Indonesia dan beberapa negara lainnya terlalu berambisi untuk mengesahkan perdagangan bebas, tanpa memperhatikan eksesnya. Selain itu, negara juga terlibat dalam proses akumulasi kapital dengan menggunakan kekuatan koersif nya untuk mendisiplinkan kelompok sosial yang resisten,” ungkapnya. Rizky mencontohkan beberapa proyek pembangunan yang memang didesain untuk menopang keberlangsungan MEA. “Di Thailand, pemerintah setempat membangun megaproyek bendungan Mekong, Rembang di Indonesia, atau bisnis minyak di Myanmar,” jelasnya.

Kecenderungan Indonesia untuk terus membangun dan menafikan aspek sosio humanis itu, berangkat dari pendekatan ketahanan ekonomi yang memang diterapkan Indonesia sejak krisis 1998. Pendekatan ketahanan ekonomi adalah model yang bertumpu pada kuantitas stok dan harga. “Asumsinya teori *supply and demand*. Kalau terjadi kelangkaan pangan misalnya, maka yang dilakukan adalah meningkatkan stok dan memainkan harga. *Nah*, yang punya kuasa untuk memainkan harga

Gerakan Politik Akar Rumput, Sebuah Jawaban

Ahmad Rizky Mardhatillah mengatakan, salah satu kunci untuk menghadapi MEA adalah penguatan gerakan sosial yang muncul dari akar rumput. “Peran pemerintah dalam hal ini pun jelas, yakni memfasilitasi serikat buruh agar aktif dalam forum tripartit dan menyuarakan hak-haknya,” ujarnya.

Bahwasanya, bukan sekadar mitos belaka, dari dulu hingga sekarang gerakan sosial terbukti mampu menggoyang bahkan merontokkan sebuah kekuasaan di negara. Gerakan sosial yang diikuti mahasiswa dan masyarakat umum mampu membuat Soeharto tumbang pada 1998. Padahal sebelumnya, siapa yang mampu membayangkan tirani sekokoh itu akan ambruk. Gerakan sosial berbasis petani di pesisir Kulon Progo mampu membuat korporasi tambang pasir besi kalang kabut, meski perjuangan mereka belum selesai hingga saat ini. Gerakan sosial di Urutwesu mampu membuat seluruh mata dunia tertuju pada perjuangan mereka.

Masalahnya, dalam kerangka MEA, musuh yang dihadapi gerakan sosial ada tiga sekaligus, yakni ne

dan stok, ya, korporasi besar, agro industri contohnya. Kalau tidak berhasil, jalan hutang pun dimanfaat kan," jelas Edy Burmansyah, pegiat ARC saat dijumpai beberapa waktu lalu.

Tergilas di negeri sendiri

Tahap selanjutnya adalah, rakyat akan cenderung berhadapan de ngan penggusuran/ *land grabbing* seperti yang terjadi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur baru-baru ini; liberalisasi ketenagakerjaan dengan membuka kans seluas-luasnya kepada ekspatriat agar bisa bekerja di dalam negeri; represi dan kriminalisasi petani seperti yang ditemui di Kulon Progo dan Urut Sewu; dan lain sebagainya.

MEA, lanjut Edy, juga menimbulkan persoalan karena neo liberalisasi mendorong investasi dalam skala besar masuk ke Indonesia. Investasi ini membutuhkan lahan, sehingga alih fungsi lahan produktif menjadi sangat tinggi. "Contoh yang paling dekat dengan kita mi salnya di Karawang. Di sana lahan beralih fungsi jadi pabrik, usaha jasa, dll. Petani rugi, karena me reka tidak lagi punya tanah, pun tak punya akses ke sektor industri. Walhasil mereka terdorong untuk melakukan urbanisasi. Di kota pun mereka tak mendapat tempat, hingga terpaksa bekerja di sektor informal jadi pemulung, tukang ojek, kuli bangunan. Puncak dari kondisi kerentanan sosial itu, akan memicu banyaknya aksi kriminalitas di perkotaan," tuturnya.

Kuasa atas lahan yang lebih condong dikendalikan oleh korporasi kian mulus, karena difasilitasi oleh negara. Di era Orde Baru, izin penguasaan lahan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) bagi modal asing dibatasi 75 tahun, sementara di era SBY batasan diperpanjang hingga 95 tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam UUPA yang mem batasi izin maksimal 35 tahun saja (IGJ).

Masih dilansir dari laman *dotcom* IGJ, imbas dari kebijakan peme rintah yang sangat memanjakan modal asing, yakni pengalokasian 175 juta hektar lahan di darat dan di laut Indonesia untuk pertambangan mineral, batubara, perkebunan, dan eksploitasi migas. Jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan luas daratan Indonesia yang hanya 195 juta hektar. Lebih dari 75% kegiatan yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam di semua sektor tersebut dikuasai oleh modal asing. "Bahkan tidak jarang izin yang diberikan pemerintah pusat berbenturan dengan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah," ungkap Sri Palupi, peneliti Ecosoc Rights Institute.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hegemoni lahan yang berada di tangan korporasi akan melahirkan model industri baru

gara, militer, dan korporasi. "Tentu perjuangan akan semakin sulit. Apalagi sejauh ini asosiasi dan serikat buruh, petani, nelayan yang semuanya tergabung dalam gerakan-gerakan sosial belum solid dan siap menghadapi ini. Belum efektif perjuangannya," ujar Sastro Maruf.

Oleh karenanya perlu digagas model baru perjua ngan, yakni lewat jalur diplomasi. Sastro yang juga aktif dalam mimbar asosiasi buruh dan petani pu nya keyakinan, bahwa gerakan sosial harus berubah format. "Ia mesti bertransformasi menjadi ge rakan politik," tandasnya. Cara itulah yang menurut Sastro, cukup efektif untuk memengaruhi kebijakan di tingkat hulu.

Organisasi rakyat di berbagai negara ASEAN sendiri, menurut Sastro, sudah pernah membahas transformasi ini dan hampir semuanya gagap. Maka, perlu diperkuat kembali gerakan tersebut. Capaian terjauhnya adalah menjadi gerakan politik berbasis partai yang semuanya dihidupi oleh warga akar rumput itu sendiri. "Ini bukan saatnya lagi menjadi gerakan lokal tapi juga regional bahkan nasional. Pun tidak boleh sektoral tapi multisektor, tidak hanya buruh tapi juga petani, serikat nelayan, NGO, akademisi," ungkapnya.

Dengan menargetkan berpartisipasi pada pemilihan umum 2019, Sastro berharap suara buruh, nelayan, dan petani akan menemukan ruang. " Selama ini kandidat pemimpin dari partai elit yang kita titipi pesan, cenderung akan mudah lupa ketika ia sudah berada di kekuasaan. Padahal untuk meng-*goal*¬-kan kebebasan dan kemerdekaan akar rumput, dibutuhkan kontinyuitas dan perjuangan yang terus-menerus," jelasnya lagi.

yang sama berbeda dengan sebe lumnya. Di sektor pertanian misalnya, perampasan atas lahan petani oleh agribisnis akan mendorong tumbuhnya perkebunan-perkebunan, sampai tercapainya f*ood estate*. "Melalui agribisnis, pertanian diproduksi secara industri, dalam jumlah sebanyak-sebanyaknya dengan ukuran seragam dan bersifat monokultur," jelas Ahmad Yakub, pegiat Serikat Petani Indonesia (*www.indoprogress.com*).

Yakub menambahkan, agribisnis juga memunculkan pasar bebas, di mana hambatan transaksi sama sekali nihil. Lantaran semangat dari pasar bebas adalah pengerukan keuntungan sebesar-besarnya, maka aktivitas bertani tereduksir menjadi produksi komoditas saja, alih-alih menyambung siklus kehidupan secara mandiri. Peran petani pun di sini juga dirancang sedemikian rupa untuk menjadi sekadar buruh murah.

Rizky Mardhatillah menuturkan, dalam konteks ini—luas lahan yang semakin menyusut dan ancaman ekspansi modal kaum industrialis—para petani dipaksa menghadapi dua pilihan sulit: tetap bertahan dengan produktivitas hasil pertanian yang terus menurun atau menjual lahannya kepada pemilik modal. Di Indonesia, implikasinya terbagi dua: (1) petani harus rela kehilangan tanah dan menjadi 'buruh tani' –atau petani yang menggarap sawah orang lain dan konsekuensinya hidup dari upah atau (2) bekerja ke kota untuk menyambung hidup, baik menjadi kaum miskin perkotaan atau buruh pabrik.

Dalam Rancangan Inpres Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Menghadapi MEA 2015, tidak terlihat keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah hanya akan menambah akses permodalan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan standar mutu produksi pangan. Namun, persoalan klasik yang dihadapi petani tidak masuk dalam strategi yang disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing petani. Petani dan nelayan tetap diletakan di posisi terbawah dalam rantai produksi pangan. Tidak ada nilai tawar yang tinggi terhadap hasil produksi petani. Hal ini karena korporasi dalam praktek agribisnis telah mengambil kontrol atas segi hulu-hilir dalam sektor pangan, seperti penentuan harga produksi, suplai, komodifikasi pangan, distribusi, hingga pengetahuan. Pada akhirnya gagasan kedaulatan petani pun berakhir utopis (IGJ).

Hal yang jauh lebih mengkhawatirkan muncul ketika negara menggandeng militer untuk mengamankan laju korporasi di bidang pertanian ini. "Hal itu sudah terlihat di Urut Sewu, di mana aparat dengan beringas memukuli petani yang tak bersenjata hingga mereka menderita luka-luka," jelas Edy lagi. Lurah setempat yang ikut menghalau pendirian pabrik semen, dihantam keningnya oleh aparat hingga berdarah. Ibu yang tengah hamil empat bulan, anak-anak yang ikut dalam kerumunan massa, hingga lelaki tua, semua tak luput dari serangan aparat militer yang konon mendapat titah langsung dari negara.

Baru-baru ini, menurut Sastro, bahkan beredar kabar, ada draf Perpres yang memuat ketentuan tentang fungsi tambahan aparat militer tidak hanya di sektor pertahanan tapi juga pengamanan. "Macam dwi fungsi ABRI begitu. Beberapa MoU itu bahkan sudah berjalan.

IMPARSIAL mencatat, ada kurang lebih 31 MoU TNI. Dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP), TNI kini mulai masuk dan terlibat dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan dengan pijakan MoU tersebut. Sayangnya, otoritas sipil baik itu pemerintah dan parlemen tidak melakukan koreksi dan evaluasi terhadap semua MoU yang ada.

Koalisi masayarakat sipil dalam rilisnya (September, 2015) menilai, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang di dasarkan pada MoU TNI bertentangan dengan UU TNI no 34/2004. Secara tegas Pasal 7 ayat 3 UU TNI menyebutkan, pelaksanaan tugas operasi militer selain perang harus di dasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara dan bukan melalui MoU. Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama dewan perwakilan rakyat (DPR) yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dengan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI). Dengan demikian, beberapa MoU yang sudah dibuat jelas-jelas bertentangan dengan UU TNI no 34/2004 (Rilis Koalisi Masyarakat Sipil, 2015).

Dengan dibentuknya berbagai MoU yang berlebihan tersebut, maka menurut Sastro TNI sudah kembali masuk dalam ranah wilayah sipil dan terlibat langsung dalam menjaga keamanan dalam negeri. "Tengok saja berbagai aksi kekerasan yang melibatkan elemen TNI di dalamnya, seperti penggusuran, pengamanan sta

siun, pengamanan pertambangan, pengamanan kawasan industri, dan kasus-kasus lainnya," tegasnya lagi. Sastro menambahkan, ini jelas menjadi kemunduran demokrasi dan kemunduran bagi proses reformasi sektor keamanan yang men syaratkan bahwa fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara sebagaimana di tegaskan UU TNI.



Ibu-ibu petani di Urut Sewu berusaha mempertahankan lahan yang sudah ditempatinya sejak puluhan tahun (literasi.co).

Senada dengan petani, buruh juga menghadapi keadaan yang sulit. Musuh yang mereka hadapi masih sama: korporasi, tapi kondisi buruh di Indonesia lebih parah karena daya saing mereka yang jauh lebih minim. Data Badan Pusat Stastitik per Februari 2015, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 210 ribu orang dibandingkan Agustus 2014, dan meningkat sebanyak 300 ribu dibandingkan Februari 2014. Jumlah pengang guran seharusnya menjadi indikator sehat-tidaknya kinerja ekonomi suatu negara. Kelesuan ekonomi nasional pada kuartal I 2015, berimbas kepada bertambahnya jumlah pengangguran. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar. Hal ini diperkuat oleh menurunnya Nilai Tukar Petani pada empat bulan terakhir (IGJ).

Kepala Kerjasama Antarlembaga dan Hubungan Internasional IGJ Priska Sabrina Luvita, sebagaimana dilansir dari laman resmi IGJ menjelaskan, pada Februari 2015 terdapat 10,04 juta orang (8,31 %) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu me reka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan yang juga mengalami kenaikan. Serapan tenaga kerja pada kuartal I 2015 kerja-kerja tanpa kepastian yang tetap dan kerja informal yang mendominasi 57,94% dari Angkatan Kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan kepastian kerja bagi rakyatnya. Pun, tingkat pengangguran berpendidikan yang meningkat 1,84 juta orang untuk lulusan SMK, 1,62 juta orang untuk lulusan Diploma I/II/III, dan 1,03 juta orang lulusan Universitas juga mengkhawatirkan bagi serapan tenaga berpendidikan di Indonesia dalam menyambut pengembangan Sumber Daya Manusia dalam isu bonus demografi dan arus tenaga kerja asing di MEA.

Angka pengangguran yang rela tif tinggi, kian diperparah dengan keleluasaan pekerja ekspatriat dalam mengisi pasar di Indonesia. Untuk tahun ini saja Kemen terian Tenaga Kerja mencatat, seba nyak 70.000 ekspatriat sudah me masuki pasar tenaga kerja di Indonesia. Mereka datang dengan kua litas yang dalam beberapa aspek jauh lebih baik dibanding yang kita punya.

Masalah lain yang membuat potensi pelanggaran HAM kian menjadi-jadi dalam MEA adalah, korupnya birokrasi. Contohnya, hak untuk ganti rugi proyek waduk Jatigede hanya diberikan per kepala keluarga sebanyak 29 juta rupiah saja (Lihat Buletin ASASI Edisi Maret-April 2015). "Angka itu jelas tak setimpal dengan besarnya ke rugian baik moril dan materil yang warga alami, seperti kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, serta ruang sosial dan budaya," kata Sastro.

Di sisi lain, proletarisasi rakyat di pedesaan dalam merespon keja dian senada akan menguat. "Jarang ada orang yang menghubungkan proyek MEA dengan berbagai penggusuran, pembangunan jalan tol, dan pengalihfungsian lahan pertanian warga. Ketika kita memahami itu, ya semuanya akan terkait. Bahwa kita sedang disiapkan menjadi ceruk pasar yang besar," imbuhnya.



PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JOKOWI

Bentuk Paket Kebijakan:

1. **Deregulasi:**
   - Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations.
   - Melakukan keselarasan antar peraturan.
   - Melakukan konsistensi peraturan.
2. **Debirokratisasi:**
   - Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya.
   - Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan penga internal yang berkelanjutan.
   - Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya).
   - Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan.
   - Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.
3. **Penegakan hukum dan kepastian usaha:**
   - Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel).
   - Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli.
   - Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

Cakupan

1. Perluasan Investasi;
2. Pengembangan industri
3. Perdagangan dan logistik
4. Pengadaan bahan baku, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan perikanan, hasil hutan dan barang tambang



Perkembangan koordinasi pembahasan deregulasi sampai dengan 9 September 2015

1. Sampai saat ini telah selesai dibahas dan diperoleh komitmen dari para K/L adalah sebanyak 134 peraturan, yaitu: 17 RPP, 11 RPerpres, 2 RInpres, 96 RPermen, dan 8 aturan lainnya.

2. Dari 134 peraturan yang siap di deregulasi sampai tanggal 9 September 2015, meliputi peraturan Menteri (Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Tenaga Kerja, Perhubungan, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PUPR, Pertanian, Pariwisata, Kesehatan, ATR), Ka BKPM, Ka BPOM, terkait fasilitas investasi, penyederhanaan ijin impor bahan baku (a.l. beras, gula, garam, hortikultura, kertas kemasan), penetapan satu identitas importir, pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor , mengurangi hambatan distribusi antar pulau (gula kristal putih), dsb.

3. Kebijakan untuk memperlancar distribusi melalui pembangunan Pusat Logistik Berikat, menarik investasi melalui pengembangan Kawasan Industri, dan Inland FTA, meningkatkan ekspor melalui fasilitasi Trade Financing.

REKAPITULASI DEREGULASI BERDASARKAN KELOMPOK / LEMBAGA

NO	Kementerian/Lembaga	PP	Perpres	Inpres	Permen	Lainnya	Total Regulasi
1	Kemenko Perekonomian	-	-	2	-	-	2
2	Kementerian Perindustrian	1	-	-	14	-	15
3	Kementerian Perdagangan	-	-	-	30	2	32
4	Kementerian Keuangan	4	-	-	6	-	10
5	Kementerian Pertanian	1	1	-	5	-	7
6	Kementerian ESDM	2	7	-	1	1	11
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	6	1	-	3	-	10
9	Kementerian Lingkungan dan Kehutanan	-	-	-	2	-	2
10	Kementerian Ketenagakerjaan	2	-	-	-	1	3
11	Kementerian Perhubungan	-	-	-	6	-	6
12	Kementerian PU PR	1	-	-	-	-	1
13	Kementerian Kesehatan	-	-	-	1	-	1
14	Kementerian Pariwisata	-	2	-	-	-	2
15	Kementerian KUKM	-	-	-	28	-	28
16	BKPM	-	-	-	-	2	2
17	BPOM	-	-	-	-	2	2
	Total Regulasi	**17**	**11**	**2**	**96**	**8**	**134**

MEA dan Pekerja Perempuan



Oleh **Zely Ariane***

Menjelang akhir 2015, Jakarta tampak bergegas menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "ASEAN adalah Kita", demikian slogannya. Untuk kepen tingan itu, berbagai proyek infrastruktur pun disiapkan. Kini, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Jakarta sedang disulap menjadi hutan puluhan lantai untuk ber bagai kegiatan komersil. Entah siapa yang dimaksud dengan "Kita" dalam slogan tersebut, dan apa pula hubungan "ekonomi bersama" ASEAN itu dengan "Kita" yang dituju dalam slogan.

Fakta yang kerap terjadi adalah jus tru hampir setiap malam di atas pukul 7 jutaan pekerja berge lombang pulang menumpang angkutan-angkutan umum dengan wajah lelah dan tak ramah. Ma yoritas dari mereka adalah perempuan. Rata-rata mereka bekerja di sektor manufaktur, perdagangan, dan finansial. Tak banyak di antara me reka yang bergaji bersih lebih dari 5 juta rupiah. Bahkan, realitas itu pun masih dibarengi dengan keadaan yang mengharuskan me reka untuk telah mempersiapkan diri sejak subuh untuk melaju ke tempat kerja dan kembali ke rumah paling cepat pada pukul 21.00.

Bagi para pekerja perempuan itu, aktivitas kerja sejak subuh menjelang malam pun masih harus dibarengi setidaknya 2-3 jam untuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga: memasak, mengurus anak, dan membersihkan rumah. Adalah kemujuran tersendiri bila pekerjaan-pekerjaan domestik itu mendapatkan bantuan dari suami. Lebih-lebih, mujur bagi mereka dengan pendapatan lebih besar lantaran dengan demikian mereka dapat mempekerjakan asisten rumah tangga. Dalam hal ini, para asisten rumah tangga itu pun ma yoritas didominasi oleh pekerja perempuan.

Kenyataan Saat Ini

Per Februari 2014, jumlah penduduk dengan usia produktif (angkatan kerja) di Indonesia adalah 125,3 juta jiwa, sementara jumlah pekerja per Februari 2014 sekitar 118,2 juta jiwa. Peningkatan partisipasi angkatan kerja didorong oleh meningkatnya keterlibatan pekerja perempuan perkotaan. Berdasarkan data International Labor Organisation (ILO) dalam Riset Kerja Layak 2006-2016, masih terjadi kesenjangan di dalam tingkat partisi pasi tersebut, yakni 85% laki-laki dan 53,4% perempuan.

Upah rata-rata pekerja perempuan masih lebih rendah dibanding upah pekerja laki-laki. Dalam siaran pers pada 20 Mei 2015, Bappenas mengakui rerata upah pe kerja pe rempuan jauh lebih rendah dari pekerja laki-laki, yaitu 1.427 juta rupiah untuk pekerja perempuan dan 1.795 juta rupiah untuk pekerja laki- laki pada 2013. Sekitar 30% pekerja perempuan berstatus tidak dibayar.[1] Para pekerja perempuan itu juga mendominasi sektor kerja informal yang berbasis kontrak. Maka, ketika keputusan penangguhan upah 2013 di DKI Jakarta diumumkan, para pe kerja perempuan di sek-

1). Lihat Siaran Pers Bappenas 20 Mei 2015: http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/menteri-andrinof-indeks-pembangunan-gender-ipg-terus-meningkat/ (Diakses pada 7 September 2015)

tor-sektor seperti garmen, tekstil, alas kaki, serta mainan termasuk sebagai korban pertama lantaran mereka mendominasi sektor tersebut. Mereka juga lebih rentan di-PHK karena pola kerjanya dianggap le bih fleksibel dan mereka bukan termasuk pekerja utama. Peng abaian hak-hak reproduksi ter hadap para pekerja perempuan di perkotaan itu juga masih menjadi isu utama, antara lain hak untuk mengambil cuti haid, cuti hamil, dan cuti keguguran yang layak.

Menurut Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans, Khairul Anwar, pekerja pe rempuan Indonesia berpotensi lebih besar mengisi pasar kerja ASEAN untuk sektor garmen dan tenaga medis. Hal ini terutama karena sebanyak 80% pekerja pe rempuan mendominasi sektor garmen saat ini.

Sementara itu, daya saing produk industri sektor manufaktur garmen dan tekstil di Indonesia jus tru semakin lemah.[2] Dalam sektor tekstil, peningkatan harga bahan bakar dan tarif dasar listrik sebagai imbas dari kebijakan penghapusan subsidi menyebabkan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia terbebani dengan mahalnya biaya produksi. Di sisi lain, daya beli masyarakat masih lemah. Hal ini diperparah lagi dengan serbu an produk tekstil dari Tiongkok sebagai hasil dari dibukanya keran impor. Konsekuensinya, pengusaha tekstil dalam negeri semakin berada di bawah tekanan.

Lantaran kondisi tersebut, para pengusaha menengah manufaktur garmen menerapkan ancaman relokasi ke wilayah lain, juga ne gara lain, dengan upah yang lebih rendah kepada para pekerja nya. Kamboja, Vietnam, dan Laos adalah sasaran utama mereka. Bayang-bayang PHK dan status kerja yang semakin fleksibel (baca: sistem kerja kontrak) di sektor ini adalah potret buram nasib perempuan pekerja ke depannya.

Kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, serta berbagai hak normatif yang tak dipenuhi sesuai aturan perundangan adalah permasalahan yang paling banyak ditemukan di sektor ini. Sektor yang diunggulkan oleh Kemenakertrans ini tidak dibarengi dengan pemenuhan hak kepada para pekerja perempuan. Sektor ini biasanya hanya menampung



Akibat tak tersedianya lapangan kerja di Indonesia, warga berbondong-bondong menjadi TKI dan TKW di luar negeri (bandungekspres.co.id).

2). Mantra, Dodi. *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme—Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Bekasi: MantraPress, Oktober 2012, hlm. 10.

pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan dan kecakapan yang rendah. Hal tersebut sering menjadi alasan untuk menekan tingkat upah para pekerja perempuan itu.

Belum lagi, pada umumnya pekerjaan rumah tangga masih menjadi wilayah yang ditangani oleh para pekerja perempuan. Dari potret tersebut, para pekerja perempuan tampak lebih "menerima" pekerjaan-pekerjaan yang di anggap tidak produktif karena sistem patriarkis masih mengakar kuat di masyarakat. Di sinilah posisi penting pekerja perempuan dalam rantai pasar kerja kapitalisme. Para pekerja perempuan dipandang memiliki nilai lebih karena mereka bersikap lebih fleksibel sehingga lebih mudah direpresi dengan penerapan peningkatan jam kerja ataupun perubahan sistem kerja yang dapat berlaku sewaktu-waktu.

Janji di Hadapan

Indonesia sejak Orde Baru menjadi pasar yang sangat menjanjikan: tenaga kerjanya yang murah, bahan baku (sumber daya alam) yang berlimpah, dan pasar yang besar (jumlah penduduk banyak). Tiga komponen "keuntungan kompa ratif" ini belum berubah. Ditambah meningkatnya jumlah 'kelas menengah' yang berpendapatan lumayan dan melonjaknya kekayaan orang-orang terkaya, pasar Indonesia sangat menjanji kan.

Perempuan pekerja Indonesia berada dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan di dalam percaturan global liberalisasi tenaga kerja. Nasib perempuan pekerja migran di luar negeri adalah potret buram lepas tangannya negara dalam melindungi dan meningkatkan kemampuan pekerja perempuan Indonesia. Justru karena tidak mendapatkan kesempatan dan kepastian kerja di dalam negerilah para perempuan, yang mayoritas berusia muda tersebut, menjadi pekerja migran.

Tidak akan ada persaingan yang adil di tengah titik berangkat yang tidak adil. Masuknya pekerja-pekerja berketerampilan dari berbagai negara di ASEAN tentu akan menyingkirkan lebih banyak tenaga kerja perempuan Indonesia. Penyingkiran ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal baru, sekaligus menambah potensi bagi tenaga kerja perempuan Indo nesia untuk menjadi pekerja migran, yang bisa jadi menjerumuskannya pada lapangan pekerjaan tanpa jaminan perlindungan. Lalu, janji apa yang ditawarkan MEA di tengah situasi mendasar pekerja perempuan yang belum banyak berubah?

Secara umum, para pemangku jabatan dan pihak-pihak yang optimis terhadap MEA menganggapnya sebagai momentum untuk menata ulang kesepakatan liberalisasi yang sudah ada, kemudahan penjua lan barang dan jasa karena makin kompetitif, kemudahan investasi asing untuk pembukaan lapangan kerja, liberalisasi pasar kerja berbasis kompetensi, serta peluang bagi Indonesia untuk menjadi sumber pemasok energi dan bahan baku industrialisasi.

Padahal, kekuatan modal dan politik dalam tata ekonomi glo bal maupun regional tidak setara. Indonesia lebih bergantung pada modal asing sehingga membuat posisi tawar negara rendah.

Liberalisasi ekonomi juga tidak bebas nilai, dalam praktiknya persaingan sempurna adalah utopia, modal besar akan menang dan kompetisi berlaku tidak ber imbang. Dampak negatifnya, hal itu justru mendorong kehancuran sektor riil, khususnya manufaktur ringan, yang pada periode se belumnya pun belum membaik. Liberalisasi pasar kerja juga akan melibas tenaga kerja dalam negeri yang taraf sumber daya dan perlindungannya masih rendah.

Pada poin terakhir inilah, nasib pekerja perempuan dalam negeri akan secara langsung dipertaruhkan lagi. Para pekerja perempuan memiliki sumber daya dan perlindungan paling rendah. Memang terdapat peningkatan jumlah perempuan yang duduk di pendidikan tinggi dibanding laki-laki. Namun, lapangan pekerjaan yang tersedia umumnya hanya men syaratkan keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah.

Dus, apakah semua pekerja pe rempuan akan mengalami kerugian? Tentu tidak. Dalam per saingan di dunia kerja, para pekerja perempuan dengan keterampilan tinggi—yang sanggup membayar pendidikan atau mendapat fasilitas memadai—berpeluang lebih besar untuk bersaing dan mengubah nasibnya. Celakanya, mayoritas angkatan kerja perempuan Indonesia saat ini bukanlah perempuan-perempuan yang mendapat untung dari sistem kekuasaan hari ini.

Maka, siapakah "Kita" di dalam ASEAN?

*****Penulis adalah peminat studi feminisme dan bekerja untuk PapuaItuKita.

Penggusuran dan Mesin Pertumbuhan Kota



Oleh **Dicky Dwi Ananta***

Beberapa hari lalu, perhatian publik kita banyak tertuju pada proses penggusuran warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Pro dan kontra muncul mengiringinya. Ada yang mendukung penolakan warga atas penggusuran paksa yang dilakukan Ahok, Gubernur Jakarta, namun banyak juga yang *nyiyir* atas kelakuan warga itu. Terlepas dari hal tersebut, opini yang berseliweran mengenai penggusuran itu, membuat kita tahu bahwa persoalan kota adalah politik sehari-hari bagi warganya. Politik yang sangat bersentuhan dengan kehidupan warga secara langsung, karena bagaimanapun kota adalah sebuah ruang bersama, seperti yang ditulis oleh Riski Amalia, terutama berhubungan dengan ruang gerak dan ruang tinggal.[1]

Walaupun sebagai ruang bersama, ternyata realitas kota saat ini tidak menjadi urusan kolektif yang (ditujukan) menguntungkan semua. Proses penggusuran dan penyingkiran masyarakat kota berjalan seiring dengan pertumbuhan kota itu sendiri. Data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) menyebutkan, selama Januari hingga Agustus 2015, setidaknya telah terjadi 30 penggusuran paksa di seluruh Jakarta. Penggusuran itu telah menyingkirkan 3433 KK dan 433 unit usaha warga dengan rata-rata telah menghuni pemukimannya selama puluhan tahun.[2] Dari seluruh penggusuran itu, setengahnya tidak mendapatkan tawaran solusi sama sekali (15 kasus), 10 kasus mendapatkan relokasi dan 5 mendapat ganti rugi. Meskipun demikian, bentuk rehabilitasi tersebut tidak selamanya layak atau sesuai dengan nilai kerugian yang benar-benar dialami oleh warga terdampak.[3] Eksposisi data tersebut menunjukkan bahwa realitas kota semakin tidak ramah pada kelompok marjinal dan miskin.

Kenyataan sosial di atas, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua untuk mulai memeriksa relasi kuasa di perkotaan yang memungkinkan adanya proses penyingkiran tersebut. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan bahwa penggusuran bukanlah takdir dan kesalahan orang miskin, juga disebabkan oleh buruknya akhlak penguasa saja. Selain itu, juga untuk menghindari penghakiman atas dasar SARA pada penguasa, misalnya Ahok yang Tionghoa. Secara lebih eksplisit, penggusuran atau penyingkiran kaum marjinal adalah masalah ekonomi politik yang bertopang pada pertarungan antar kekuatan sosial yang historik dan spesifik untuk mendapatkan sumber daya material yang riil dalam suatu teritori tertentu. Oleh karenanya, hasil dari pertarungan antar kekuatan sosial itu juga bukanlah takdir, melainkan bergantung pada praktik sosial yang berhubungan dengan pertarungan atau perjuangan tertentu.

Aliansi 'Mesin Pertumbuhan' Kota

Dalam studi ekonomi poli-

1) Rizki Amalia Affiat, "Ketika Publik Hanya Numpang Lewat: Penggusuran Kampung Pulo, Nasib Komuter dan Partikulerisme Militan yang Senyap", diunduh darihttp://islambergerak.com/2015/08/ketika-publik-hanya-numpang-lewat-penggusuran-kampung-pulo-nasib-komuter-dan-partikularisme-militan-yang-senyap/ diakses pada 02 September 2015 pukul 19.30 WIB.

2) Aldo Fellix Januardy, *Kami yang Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015*, Jakarta: LBHJ, hlm. 9-10;17. Laporan dapat diunduh dihttp://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2015/08/Laporan-Penggusuran-Paksa-Jakarta.pdf

tik perkotaan, dikenal sebuah pendekatan untuk melihat per kembangan kota dari sudut pandang per tumbuhan, yang sering disebut sebagai mesin pertumbuhan atau *growth machine*. Menurut pendekatan ini, pembangunan kota kapitalis selalu digerakkan mesin-mesin pertumbuhan yang terbentuk dari aliansi kekuatan bisnis. Pendekatan ini dikenalkan oleh Logan dan Molotch, yang memiliki tesis bahwa aktivisme bisnis selalu menjadi kekuatan pendorong dari terbentuk dan tumbuhnya kota.[4] Kekuatan bisnis di sini secara spesifik berupa 'rentiers' atau kelompok pengembang yang mendapatkan untung dari proses pembangunan atau investasi. Sementara kata 'pertumbuhan' di sini kadang tidak selalu merujuk pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam sebuah kota, melainkan lebih mengarah pada perkembangan properti dan fisik. Dengan begitu, perkembangan kota dilihat sebagai hasil dorongan dari aktivitas bisnis yang dikerjakan oleh para rentiers itu.

Kekuatan bisnis yang menjadi mesin pertumbuhan ini tidak bekerja secara sendirian. Mereka biasanya membentuk sebuah aliansi yang terdiri dari kelompok bisnis (ren tiers), pemerintah dan kelompok masyarakat yang diuntungkan. Pemerintah terlibat dalam aliansi mesin pertumbuhan karena mereka yang paling *concern* membutuhkan pertumbuhan untuk kotanya. Legiti masi pertumbuhan itu dibutuhkan karena berhubungan dengan pendapatan daerah dan dukungan politik. Menurut Alan Harding, di antara rentiers sendiri, terdapat tiga bentuk aliansi yang sering terjadi, diantaranya terdiri dari, *pertama*, kelompok d*eveloper, financier*, atau mereka yang langsung mendapat untung dari proses pembangunan; *kedua*, kelompok yang mendapatkan untung secara tidak langsung, biasanya dari peningkatan penggunaan jasa dan produknya karena pem bangunan, misalnya media lokal atau suplier material pembangunan; dan *ketiga*, kelompok-kelompok kepen tingan di dalam ma syarakat yang mendapatkan ke untungan dari proses pertum buhan kota.[5] Oleh karenanya, kelit kelindan mengenai pem bangunan kota selalu berbentuk jejaring kepentingan yang saling menguntungkan di antara me reka. Aktivitas aliansi yang menjadi struktur mesin pertumbuhan kota ini yang mengakibatkan pembangunan dan perebutan ruang di kota seringkali tidak ditentukan oleh perencanaan ruang secara matang, melainkan hasil dari dorongan dan pertarungan di antara mereka.

Apa yang terjadi di Jakarta saat ini, seperti mengonfirmasi argumen di atas. Pertumbuhan kota di Jakarta bisa dibaca dengan kerangka mesin pertumbuhan itu. Hal tersebut bisa dilihat dari perkembangan properti dan infrastruktur. Dalam beberapa tahun ini, Jakarta menjadi salah satu kota yang memiliki pertumbuhan properti paling tinggi di dunia.[6] Antara 2013 dan 2014, pertumbuhan properti ini mencapai 20-30 persen per tahun. Meskipun pada 2015 diperkirakan akan turun, tapi angka pertumbuhan properti di Jakarta masih di kisaran angka 10-15 persen per tahun.[7] Menurut data Bank Indonesia (BI), dalam tahun ini saja, masih akan ada tambahan pasokan dari beberapa ritel, mi salnya Lippo Mall Puri, Mall Pantai Indah Kapuk, One Bell Park, dan Central Park Extension. Selain itu juga akan ada tambahan pasokan apartemen sewa, seperti TBS Li nera Apartmen Service, Fraser Place Setia Budi Sky Garden, Peja ten Park Residen, dan Fraser Suite Ciputra World.[8]

Menurut perkiraan BI juga, ke depan perkembangan pasokan apartemen di Jabodetabek diperkirakan akan terus meningkat sampai 2018, terkait dengan banyaknya apartemen yang memasarkan to wer lanjutan. Sementara, pasokan lahan industri diperkirakan tidak bertambah, melainkan bergeser ke wilayah periferi seperti Bodebek dan Banten.[9] Tingkat hunian properti komersial sewa di Jabodetabek pada triwulan II 2015 saja masih terus tumbuh di banding quarter sebelumnya. Misal nya, tingkat hunian ritel me ningkat 96,90 persen menjadi 97,34 persen, apartemen sewa 81,33 persen menjadi 88,11 per sen, *convention hall* 68,22 persen menjadi 79,88 persen, maupun okupansi hotel berbintang yang meningkat 54,04 persen menjadi 55,99 persen.[10] Sementara itu, peningkatan penjualan properti komersial pada triwulan II 2015 secara umum masih menunjukkan

3) Ibid. hlm. 16

4) J. Logan and H. Molotch, *Urban Fortune: The Political Economy of Place, Berkeley*: University of California Press, 1987, p. 52

5) Alan Harding, "Elite Theory and Growth Machine" in David Judge, Gerry Stoker, and Harold Wolman, Theories of Urban Politics, London: Sage Publication

pertumbuhan meskipun pasokan properti sedang stagnan.[11] Dengan demikian, secara umum bisa dilihat bahwa bisnis properti di Jakarta selalu tumbuh tiap tahunnya.

Selain potret pertumbuhan pro perti yang tinggi, kota Jakarta juga menunjukkan pembangunan yang kadang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada. Misalnya, wilayah untuk tangkapan air dan hutan kota yang kemudian dikonversi peruntukannya karena dimiliki oleh konglomerasi dan korporasi, justru dibiarkan begitu saja oleh Pemda Jakarta. Sebagai contoh, daerah resapan air Kelapa Ga ding yang dikonversi menjadi Mall Kelapa Gading dan Kelapa Gading Square; Pantai Indah Kapuk yang sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung menjadi pemukiman elit Pantai Indah Kapuk, Mutiara Indah, dan Damai Indah Padang golf; kawasan Sunter yang me rupakan area resapan air menjadi pemukiman elit Sunter Agung, PT Astra Komponen, Astra Daihatsu, PT Denso Indonesia, dan PT Dunia Express Trasindo; Hutan Kota Se nayan menjadi Hotel Mulia, Sultan Hotel, SPBU Semanggi, Senayan Residence Apartment, Hotel Century Atlet, Simprug Golf, dan Plaza Senayan; serta Hutan Kota Tomang menjadi Mall Taman Anggrek dan Mediteranian Garden Residence I dan II.

Pertumbuhan kota seperti di atas dapat menunjukkan karakter aliansi kekuasaan yang terbentuk melalui mesin pertumbuhan. Fakta-fakta di atas dapat menunjukkan bahwa kota, seperti Jakarta, tumbuh melalui dukungan kapitalis developer yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Dengan begitu, sebenarnya kita bisa melihat bahwa Ahok saat ini berdiri di atas topangan atau basis politik yang didukung oleh kapitalis develo per dalam membangun kotanya. Aliansi kekuasaan yang terbentuk di antara mesin pertumbuhan ini bukanlah karena kesepakatan tanpa materai. Harding menyebutkan bahwa aliansi itu terbentuk karena adanya adanya "*tangible benefits*" yang ingin diperoleh.[12] Sumber daya material yang riil ini yang kemudian mengikat mereka untuk bekerja secara bersama-sama.

Tangible benefits atau sumber daya material yang bisa didapatkan dalam aliansi kekuasaan berbentuk mesin pertumbuhan ini setidaknya terdapat dua hal: *pertama*, dari ruang yang disediakan untuk memfasilitasi pertumbuhan properti seperti di atas; dan *kedua*, duku ngan anggaran yang tinggi dalam hal infrastruktur. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta (APBD DKI) menyebutkan, sejak 2009, anggaran untuk pembangunan infrastruktur selalu menempati posisi dominan, meskipun sampai 2012 selalu menunjukkan tren yang menurun. Bahkan pada 2013, anggaran infrastruktur lebih kecil dari anggaran sosial. Di saat yang bersamaan anggaran sosial, pendidikan dan kesehatan, menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya. (17,5 persen di bawah anggaran pendidikan yang mencapai 18,38 persen). Namun, sejak APBD-P 2013, anggaran untuk infrastruktur mulai naik (18,55 persen) dan mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada 2014 (23,8 persen).

Anggaran PU atau infrastruktur menjadi salah satu sumber daya material karena di sana tersedia anggaran publik yang bisa digunakan untuk bagian dari akumulasi. Karena secara spesifik, karakter kapitalis developer itu bermain dalam kerangka oligar kis, maka pencarian dana publik atau proyek pemerintah menjadi salah satu sumber pendapatan nya. Selain itu, pembangunan infra struktur juga bisa menopang pertumbuhan properti dalam suatu kawasan tertentu.[13] Logan dan Molotch juga menyebutkan, mesin pertumbuhan itu, dalam banyak kasus, tercipta melalui transfer kekayaan yang bersifat publik pada para rentiers dan aliansinya.[14] Sehingga, di sini anggaran publik menjadi salah satu sumber daya material yang penting untuk diperebutkan di antara mereka. Konsekuensinya, dengan begitu anggota aliansi kekuasaan yang terbentuk bisa dilihat melalui ' siapa mendapatkan apa dalam proyek mana?'

Lonjakan anggaran APBD untuk pembangunan umum itu ternyata juga paralel dengan data penggusuran selama ini. Data LBHJ me nunjukkan bahwa sebagian besar penggusuran di Jakarta pada 2015 ditujukan untuk pembangunan infra struktur, termasuk normalisasi perairan.[15] Selain itu, dana yang digunakan untuk menggusur itu juga sebagian besar menggunakan dana APBD (21 kasus). [16] Meski-

6) "Jakarta Jadi Kota dengan Perkembangan Investasi Properti Tertinggi", diunduh darihttp://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/11/11/nevd38-jakarta-jadi-kota-dengan-perkembangan-investasi-properti-tertinggi diakses pada 03 September 2015 pukul 22.00 WIB

7) "Tahun Depan Pertumbuhan Properti Mencapai 10-15 Persen", diunduh darihttp://properti.kompas.com/read/2014/11/29/133827421/Tahun.Depan.Pertumbuhan.Properti.Mencapai.10.-.15.Persendiakses 04 September 2015 pukul 01.38 WIB.

pun pembangunan infrastruktur dalam permukaan terlihat baik untuk publik luas, namun upaya pembangunan itu sebenarnya bagian dari upaya mesin pertumbuhan mendapatkan sumber daya material di perkotaan. Agar upaya untuk mendapatkan sumber daya material dari aliansi mesin pertumbuhan itu terlihat normal maka upaya legitimasi melalui ideologisasi 'pembangunan bebas nilai (*value-free development*)'[17] itu sangat penting. Pembangunan opini bahwa '*ini untuk kebaikan bersama*' menjadi dominan di dalam media. Meskipun pembangunan itu selalu berujung pada penggusuran masyarakat setempat.

Akhirnya dalam ruang perkotaan yang terbatas sedangkan kebutuhan untuk akumulasi dari mesin pertumbuhan ini terus bergulir, maka pertarungan untuk memperoleh lahan guna menopang pertumbuhan properti dan pembangunan fisik menjadi tak terelakkan. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak selalu baik untuk semua warga. Kelompok miskin atau bisnis kecil dalam perkotaan biasanya menjadi korban penggusuran dalam penataan ulang kota dalam kerangka mesin pertumbuhan ini, yang tujuan utamanya untuk meningkatkan profit 'mesin pertumbuhan' melalui pembangunan properti dan fisik/ infrastruktur. Selain itu, tingkat persaingan di antara para rentiers juga menjadi dinamika tersendiri dalam mempengaruhi kota, sehingga penggusuran warga kampung dalam perkotaan berhubungan dengan pertarungan kekuatan-kekuatan sosial dalam perebutan ruang kota.

Salah satu konsekuensi dari itu maka upaya pembentukan kota yang partisipatif dari warganya, melalui, misalnya, hak atas kota, selalu bertabrakan dengan kepentingan aliansi kekuasaan yang berbentuk mesin pertumbuhan. Akibatnya, meskipun pada awalnya upaya dialog dalam kasus penggusuran bisa dijalankan, namun bila itu tidak sesuai dengan dorongan mesin pertumbuhan, maka warga kampung menjadi pilihan untuk dikalahkan oleh pemerintah kota dengan cara digusur.

Dengan demikian, kota kapita lis pada dasarnya dibentuk oleh dorongan dan persaingan di antara aliansi mesin pertumbuhan yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya material yang nyata. Kasus penggusuran di kota-kota besar merupakan bagian dari pertarungan antar kekuatan sosial di dalamnya untuk mendapatkan sumber daya material tersebut. Bila kota itu tumbuh melalui mesin pertumbuhan, maka hal yang utama untuk siapapun yang berdiri sebagai pemimpin kota adalah memfasilitasi perkembangan kota seperti yang dijelaskan di atas. Untuk itu, bila warga kota mengingin kan pembangunan kota yang lebih partisipatif dan manusiawi, maka tak ada jalan lain, selain dengan mulai menghimpun diri secara aktif untuk terlibat dalam perumusan politik kota. Salah satunya dengan membangun kekuatan politik alternatif guna merebut kepemimpinan politik dalam teritori kota itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan warga miskin perkotaan dapat me miliki marwah sebagai warga ne gara sebagaimana mestinya.

***** Penulis adalah ma*hasiswa Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan Sekjen SEMAR UI. Dapat dihubungi melalui dickydwiananta@gmail.com*.

Artikel ini sebelumnya pernah dimuat di www.indoprogress.com. Dimuat di sini atas persetujuan penulis, untuk tujuan advokasi dan disunting sesuai kebutuhan.

---

8) Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Properti Komersial Triwulan II 2015", dapat diunduh dihttp://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/properti-komersial/Documents/Laporan_PPKom_Q2_2015.pdf, hlm.2

9) Ibid. hlm. 4

10) Ibid. hlm. 2

11) Ibid. hlm. 4

12) Alan Harding, op.cit. p. 42

13) "Jabotabek Surga Investasi Properti" diunduh darihttp://lipsus.kontan.co.id/v2/proyeksi2015/read/221/Jabodetabek-surga-investasi-properti diakses pada 04 September 2015 pukul 01.46 WIB

14) Logan and Molotch, op.cit. p.53

15) Aldo Fellix Januardy, op.cit. hlm. 10-11

16) Ibid. hlm. 14

17) Alan Harding, op.cit.

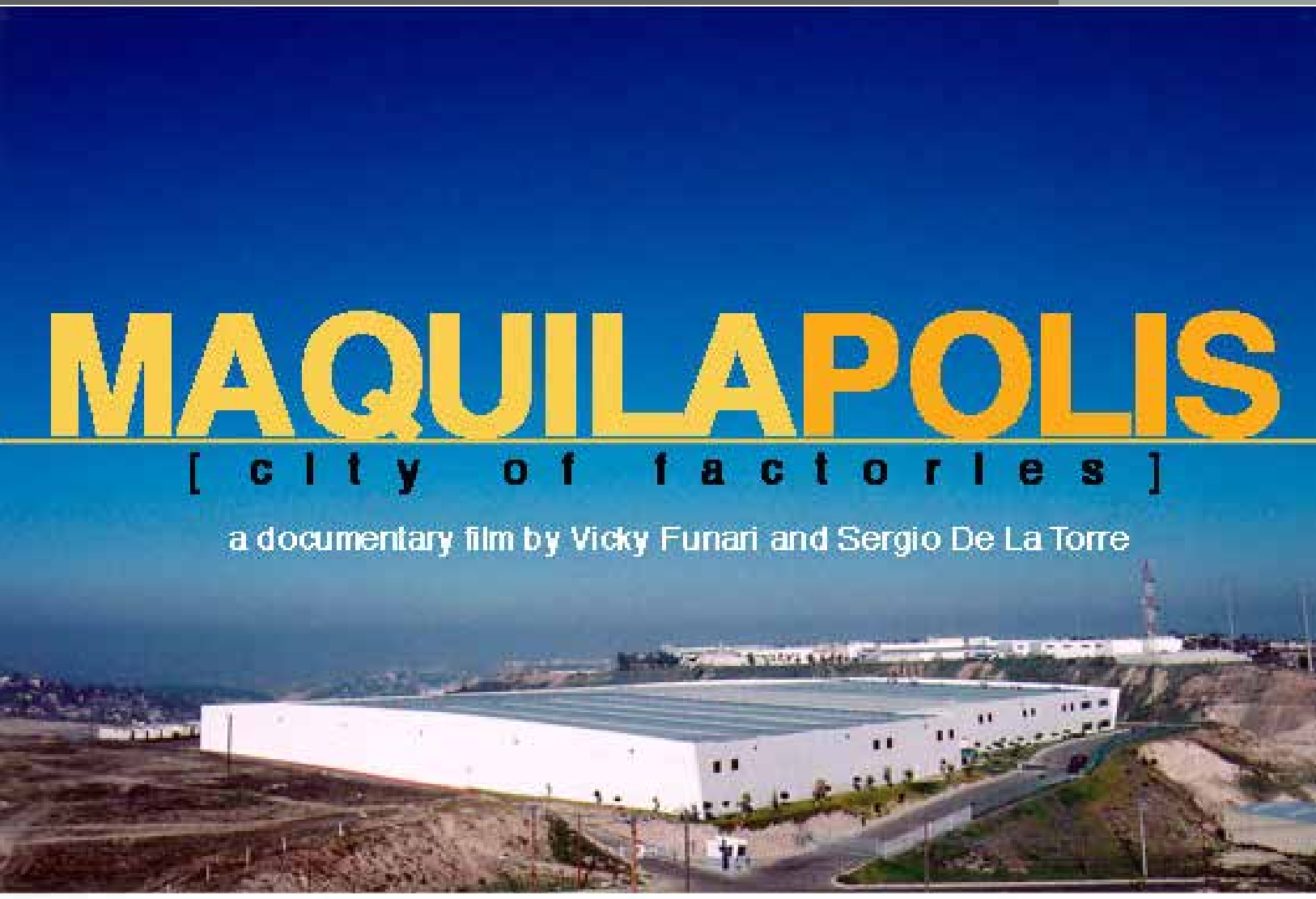

Laissez-faire Regional, dari *Maquiladora* ke MEA



Oleh **Azhar Irfansyah***

Ilmuwan sosial, menurut Ha-Joon Chang dalam *Economics: The User's Guide*, mengemban tanggung jawab moral untuk menghindari uji coba terhadap masyarakat (Chang, 2014). Tanggung jawab moral inilah yang memberi arti penting menyimak sejarah bagi ilmuwan sosial. Dengan menyimak babak-babak sejarah, kita dapat melihat pola-pola sebab-akibat dan mengambil *ibroh*. Perang Dunia I dan II, misalnya, menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Eropa untuk memelihara keamanan regional.

Bagaimana dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada Januari 2016 nanti? Dari babak sejarah mana kita dapat menerawang dampak-dampak yang kelak akan dibawa MEA?

Meski tergolong sebagai kebija-

kan baru di tingkat regional Asia Tenggara, karakteristik-karakteristik dari kebijakan MEA sebenarnya dapat dilihat pula pada kebijakan tingkat regional lain. *Laissez-faire* (doktrin *neoliberal*, diambil dalam bahasa Prancis yang artinya "biarkan saja mengalir") termaktub dalam elemen-elemen inti MEA: kebebasan arus barang, jasa, investasi, modal, dan pekerja terampil. "Kebebasan-kebebasan" macam ini sebenarnya sudah menjadi mantra lama dari perancang kesejahteraan neoliberal, terutama di negara-negara dunia ketiga. Jadi dapat dibilang tak ada nilai kebaruan dari MEA sebagai kebijakan laissez-faire regional.

Border Industrialization Program, atau lebih dikenal sebagai *Maquiladora*, yang diterapkan pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat pada 1960-an, merupakan salah satu babak sejarah *laissez-faire* industri paling awal di dunia ketiga. Maquiladora inilah yang kemudian memuluskan jalan menuju *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) pada 1996. Film dokumenter besutan Vicky Funari dan Sergio De La Torre, *Maquilapolis: City of Factories*, menunjukkan dampak-dampak *laissez-faire* regional di tataran lokal.

Dalam pembuatan dokumenter *Maquilapolis*, Funari dan De La Torre berkolaborasi dengan aktivis-aktivis buruh perempuan Tijuana. Kolaborasi inilah yang membedakan *Maquilapolis* dari film-film dokumenter kebanyakan. *Maquilapolis* tak menempatkan para buruh Tijuana sebagai objek atau korban yang patut dikasihani, tetapi sebagai subjek yang mampu menyusun perspektif dan agenda politiknya sendiri. "Kami ingin merengkuh subjektivitas mereka sebagai nilai, lalu menggabungkan pembuatan film kami dengan suara mereka," terang Funari tentang kentalnya subjektivitas dalam *Maquilapolis*. Salah satu dampak dari kolaborasi dengan subjek cerita adalah kaburnya batas antara ranah publik dan personal dalam *Maquilapolis*. Dikaburkannya batas ini membantu kita untuk melihat dampak yang dibawa Maquiladora. Program baik di ranah publik (pabrik, kota) maupun di ranah personal (keluarga, rumah). Seperti dijelaskan De La Torre, *Maquilapolis* "bukan hanya menjabarkan fakta, melainkan juga menukik ke realitas sehari-hari."

Banyak cuplikan dalam *Maquilapolis* ditampilkan sebagai video diary dari dua aktivis buruh perempuan Tijuana, Carmen, dan Lourdes. Carmen orang tua tunggal bagi tiga anak. Ia bekerja selama enam tahun di pabrik televisi Sanyo, merakit bagian *flyback*. Sanyo hanya salah satu pabrik perakitan televisi dari ribuan pabrik yang bergerak di bidang yang sama. Karena banyaknya jumlah pabrik perakitan televisi, Tijuana menyandang gelar "Ibu Kota Televisi Dunia". Selama bekerja, Carmen terpapar zat-zat kimia yang menggerogoti kesehatannya. Carmen kemudian mengidap anemia, kadang ia tiba-tiba mimisan saat bekerja *shift* malam. *Assembly line* juga memaksa Carmen bekerja tanpa henti dengan jam istirahat yang minim. Ia harus menahan buang air kecil hingga berjam-jam, sampai-sampai fungsi ginjalnya terganggu. Para buruh dipaksa mengorbankan kesehatannya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tak hanya itu, Sanyo juga dengan entengnya memindahkan pabrik ke Indonesia demi tenaga kerja yang lebih murah lagi. Ia juga menolak membayar pesangon.

Lourdes juga buruh yang bekerja untuk salah satu pabrik di Tijuana. Namun cerita dari *video diary* Lourdes lebih banyak mengulas dampak lingkungan *Maquiladora* di Tijuana. Lourdes yang tumbuh besar di Tijuana melihat sungai yang melintas di depan rumahnya tercemar dan rusak oleh derasnya industrialisasi. Sungai yang dulunya jernih jadi berwarna, berbusa, dan berbau. Di masa kanak-kanak, Lourdes seringkali berenang di sungai itu, sementara keluarganya berkemah di tepian. Kini sungai di depan rumah Lourdes bukannya membawa kebahagiaan, melainkan epidemik penyakit. Dari alergi kulit, gangguan pernapasan, *hydrocephalus*, hingga bayi yang lahir tanpa kuku harus ditanggung penduduk yang bermukim di dekat sungai. Bukan hanya sungai, infrastruktur pemukiman di lingkungan para buruh juga tak terurus. Meskipun dijadikan salah satu pusat perakitan elektronik dunia, listrik rumah tangga di permukiman buruh Tijuana bergantung pada jejaring kabel yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kabel-kabel yang mengalirkan listrik dibiarkan terjulur sembarangan di tanah, beberapa bagian mendesis karena terendam air. Anak perempuan tetangga Lourdes yang masih kecil pernah tersengat listrik hingga hampir tewas saat terjatuh di atas juluran kabel. Lourdes juga mengarahkan kameranya ke limbah yang dengan seenaknya ditinggalkan pabrik ketika pindah dari Tijuana. Salah satu nya adalah limbah besi dan baterai yang ditinggalkan begitu saja oleh Metales y Derivados. Pemiliknya kabur dan hidup enak di San Diego, wilayah Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Tijuana.

Meskipun memulai ceritanya dari risiko yang harus ditanggung buruh dan penduduk Tijuana, Maquilapolis tak hanya mendokumentasikan nelangsa untuk menerbitkan rasa iba penonton. Maquila yang tercemar. Ia menggelar kampanye dengan mengusung slogan "Tijuana bukan tempat sampah!" Carmen dan Lourdes belajar bersama aktivis-aktivis akar rumput lain yang menamakan diri *promotoras* tak kehilangan selera humor dan apresiasi terhadap seni. Adegan ketika para *promotoras* ber

yang memprihatinkan, ditambah dengan perjuangan berat yang harus mereka hadapi, para *promo-*



Salah satu scene dalam film "Maquilapolis".

polis juga menunjukkan bagai mana Carmen, Lourdes, dan para buruh lainnya di Tijuana bangkit sebagai subjek politik, untuk me rumuskan agendanya sendiri melawan ke sewenang-wenangan modal. Sejak dipecat tanpa pesangon oleh Sanyo, Carmen yang sebelumnya loyal pada perusahaan menjadi aktivis—melakoni pertarungan tak imbang yang ia sebut sebagai "Daud me lawan Goliath". Sementara Lourdes menggalang dukungan penduduk sekitar untuk memaksa peme rintah Meksiko dan Amerika Serikat memperhatikan soal lingkungan

ras. "Dari awalnya menjadi murid, kemudian secara bertahap kamu juga menjadi guru," begitu Carmen menggambarkan proses belajar bersama para *promotoras* yang kebanyakan perempuan. Kebanyakan buruh, 80 persen, yang bekerja di *Maquiladora* adalah perempuan. Ini karena buruh perem puan dianggap lebih murah dan penurut. Banyak di antara buruh perempuan juga berstatus orang tua tunggal seperti Carmen.

Meskipun harus hidup dalam kondisi lingkungan dan kesehatan

diri terpaku dengan tatapan kosong lalu melakukan gerakan pantomim seolah mereka sedang bekerja di depan *assembly line* menjadi sangat khas dalam *Maquilopolis*. Kadang gestur *assembly line* itu diikuti narasi puitis dari salah satu aktivis buruh. "Tekan, lepas, tekan, lepas. Sementara saya terus bertanya-tanya bagaimana keadaan di rumah. Apakah anak laki-laki saya sudah pulang? Bagaimana keadaannya? Sudahkah ia makan? Bagaimana dengan gadis-gadis kecil saya? Apakah mereka bermain di luar? Sudahkah mereka

menyelesaikan pekerjaan rumah? Apakah mereka bertengkar satu sama lain? Lalu saya menekan melepas, menekan, melepas. Begitu terus sampai selesai," begitu bunyi salah satu narasi. Inilah puisi khas seorang ibu yang bekerja di pabrik. Ada pula adegan para akti vis buruh menyebutkan nama-nama perusahaan yang mempekerjakan mereka di pabrik. "Santomi, Sanyo, Panasonic, Deltech, Optica Sola, Samsung, La Estrela.." Cara para aktivis buruh menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut mengingatkan pada Arya Stark dalam *Game of Thrones* yang menyebutkan nama-nama orang yang menzalimi keluarganya.

Perjuangan Carmen dan Lourdes akhirnya membuahkan hasil setelah dilakoni bertahun-tahun. Para buruh yang dipecat Sanyo mendapat pesangon sebesar 2.500 USD. Jumlah ini jauh lebih besar dari besaran pesangon yang biasa nya diberikan perusahaan-perusahaan di Tijuana. Carmen menggunakan uang pesangonnya itu untuk memperbaiki rumahnya yang bobrok. Sementara Lourdes dan kawan-kawan akhirnya memaksa pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko untuk lebih perhatian pada limbah. *Metales y Derivados* yang mangkrak selama bertahun-tahun akhirnya dibersih kan. Tapi kemenangan-keme nangan kecil ini masih menyisakan jalan perjuangan yang masih panjang. Selain Carmen, masih ba nyak buruh lain yang kesehatannya digerogoti bahan-bahan kimia di pabrik. Angka pabrik yang hengkang ke Asia untuk mencari tenaga kerja yang lebih murah juga se makin meningkat, menyisakan banyak kasus macam Sanyo. Dalam hal lingkungan, seberapa jauh peme rintah Meksiko dan Amerika Serikat akan menjalankan komitmennya? Sementara sungai di depan rumah Lourdes mungkin tak akan bisa kembali seperti sediakala.

Laissez-faire di Tijuana mungkin dapat disimpulkan melalui pernyataan Magdalene, aktivis *Coalicion de Salud Ambiental* yang membantu Lourdes. "Perusahaan-perusahaan dapat pergi bebas ke mana pun di dunia. Namun, datangnya modal diikuti dengan dampak-dampak yang harus ditanggung lingkungan dan ma syarakat," ujar Magdalene.

Masyarakat Asia Tenggara yang sedang mengantisipasi datangnya MEA barangkali perlu belajar dari Carmen dan Lourdes, dari Maquiladora. Impian membangun pasar regional yang terbuka dan kompetitif dapat berujung pada kemalangan kelas-kelas sosial yang selama ini sudah sedemikian tertindas. "Ketidakmenentuan pekerjaan dan perampasan lahan akan terjadi lebih marak lagi," begitu prediksi Ibon Foundation yang berbasis di Filipina. Beberapa rezim mungkin akan mengorbankan kemanusiaan demi menjadi kompetitif (Diplomat, 2015). Perlu diingat pula kesenjangan antara negara-negara di Asia Tenggara sangat lebar. Di satu sisi, ada Singapura dan Brunei yang termasuk dalam lima negara terkaya di dunia, di sisi lain ada Burma yang menempati posisi 23 negara termiskin di dunia (*Business Insider,* 2015). Kesenjangan ini menandakan kesiapan yang berbeda dari masyarakat di negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi MEA.

Barangkali tanggapan terhadap MEA akan bergantung kelas sosial masing-masing. Bagi kelas sosial menengah ke atas, MEA berarti liburan murah ke negara tetangga atau barang-barang bermerek de ngan harga yang lebih terjangkau. Sementara bagi petani dan kelas pekerja, MEA berarti perampasan lahan yang semakin gila-gilaan dan status pekerjaan yang semakin tak menentu. Meskipun dikatakan hanya pekerja berketerampilan yang dapat keluar-masuk dengan bebas, modal yang semakin mudah datang dan pergi dapat membuat nasib buruh di perkotaan semakin tak pasti. *Laissez-faire* kebebasan pasar, yang kita antisipasi dalam MEA, hanyalah kebebasan nya segelintir orang. Bukan kebebasannya para petani dan buruh yang merupakan mayoritas penduduk Asia Tenggara.

**Penulis adalah relawan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane. Saat ini tengah merampungkan studi master di Studied Inter-Asia NGO Studies Universitas Sungkonghoe.*

Judul: Maquilapolis (City of Factories)
Tahun Rilis: 2006
Sutradara: Vicky Funari & Sergio De La Torre.
Durasi: 68 Menit

COMING SooN



KURSUS HAM PENGACARA XIX

10-24 November 2015

CP: Kania Mamonto
08812823594/021 7972662
training@elsam.or.id

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jalan Siaga II no. 31, Pejaten Barat, Jakarta
021- 7972662 | www.elsam.or.id